

JURNAL KOMPILEK

Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

- Retno Murni Sari* **RENCANA ANGGARAN KEUANGAN DAERAH BASIS KONSEP PERAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (STUDI PADA PEMDA KABUPATEN TULUNGAGUNG)**
- Sandi Eka Suprajang* **ANALISIS KEPUTUSAN KONSUMEN MEMBELI INDOMIE MELALUI ATRIBUT PRODUK (STUDI PADA KONSUMEN DI KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR)**
- Kristya Damayanti* **STRATEGI DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH BERASURANSI PADA PEMASAR ASURANSI TAHAPAN BERJANGKA PT BANK CENTRAL ASIA BLITAR**
- Riris Dewi Larasati/
Yudhanta
Sambharakreshna* **ANALISIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) UNTUK MEMINIMALKAN KREDIT MACET PADA PNPB MANDIRI PERDESAAN (STUDI KASUS PADA UPK KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR)**
- Nanang Dwi Hermawan/
Siti Sunrowiyati* **ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN BERDIKARI JAYA CRAFT KOTA BLITAR)**
- Yesti Nawangsari/
Iwan Setya Putra* **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT DALAM MENURUNKAN TINGKAT KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM "KHARISMA MITRA KARYA"**
- Ajeng Jevia Putri/
Sulistya Dewi
Wahyuningsih* **MENURUNKAN POTENSI KREDIT MACET MELALUI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DI PT. BPR NUSAMBA WLINGI-BLITAR**
- Tetty Widiyastuti* **PENGARUH RASIO LEVERAGE DAN RASIO PROFITABILITAS TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI)**
- Rony Ika Setiawan* **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: SEBUAH TINJAUAN ETIS DAN REGULATIF DALAM BISNIS**

[Vol 8, No. 1]

Hal. 1 - 114

Juni 2016

Diterbitkan oleh:
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESUMA NEGARA BLITAR
 Jl. Mastrip 59 Blitar 66111, Telp./Fax : (0342) 802330/813779
 Email : info@stieken.ac.id**

JURNAL KOMPILEK

Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

**Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
STIE Kesuma Negara Blitar sebagai terbitan yang menyajikan informasi dan
analisa persoalan ilmu ekonomi, manajemen, maupun akuntansi.**

Pelindung

Iwan Setya Putra, SE., Ak., MM.

Pemimpin Redaksi

Aris Sunandes, SE., MM.

Sekretaris Redaksi

Vera Noviana, SE., Ak.

Pelaksana Redaksi

Siti Sunrowiyati, SE., MM.

Sandi Eka Suprajang, SE., MM.

Penyunting

Tanto Askriyandoko Putro, SE., MM.

Reviewers:

Prof. Dr. HM. Pudjihardjo, SE, MS – Universitas Brawijaya
Iwan Setya Putra, SE., Ak., MM – STIE Kesuma Negara
Yudhanta Sambharakreshna SE., MSi., Ak – Universitas Trunojoyo

Alamat Redaksi:

**Kampus STIE Kesuma Negara
Jl. Mastrip No. 59, Blitar, Jawa Timur – 66111**

Telepon/Fax:

(0342) 802330 / (0342) 813788

on-line:

<http://www.stieken.ac.id>

E-mail:

info@stieken.ac.id

JURNAL KOMPILEK

Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

Daftar Isi :

- Retno Murni Sari* **RENCANA ANGGARAN KEUANGAN DAERAH BASIS KONSEP PERAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (STUDI PADA PEMDA KABUPATEN TULUNGAGUNG)**
(Hal. 1-7)
- Sandi Eka Suprajang* **ANALISIS KEPUTUSAN KONSUMEN MEMBELI INDOMIE MELALUI ATRIBUT PRODUK (STUDI PADA KONSUMEN DI KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR)**
(Hal. 8-20)
- Kristya Damayanti* **STRATEGI DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH BERASURANSI PADA PEMASAR ASURANSI TAHAPAN BERJANGKA PT BANK CENTRAL ASIA BLITAR**
(Hal. 21-34)
- Riris Dewi Larasati/
Yudhanta
Sambharakreshna* **ANALISIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) UNTUK MEMINIMALKAN KREDIT MACET PADA PNPM MANDIRI PERDESAAN (STUDI KASUS PADA UPK KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR)**
(Hal. 35-49)
- Nanang Dwi Hermawan/
Siti Sunrowiyati* **ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN BERDIKARI JAYA CRAFT KOTA BLITAR)**
(Hal. 50-66)
- Yesti Nawangsari/
Iwan Setya Putra* **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT DALAM MENURUNKAN TINGKAT KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM "KHARISMA MITRA KARYA"**
(Hal. 67-80)
- Ajeng Jevia Putri/
Sulistya Dewi
Wahyuningsih* **MENURUNKAN POTENSI KREDIT MACET MELALUI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DI PT. BPR NUSAMBA WLINGI-BLITAR**
(Hal. 81-91)
- Tetty Widiyastuti* **PENGARUH RASIO LEVERAGE DAN RASIO PROFITABILITAS TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI)**
(Hal. 92-100)
- Rony Ika Setiawan* **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: SEBUAH TINJAUAN ETIS DAN REGULATIF DALAM BISNIS**
(Hal. 101-114)

**RENCANA ANGGARAN KEUANGAN DAERAH
BASIS KONSEP PERAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
(STUDI PADA PEMDA KABUPATEN TULUNGAGUNG)**

Retno Murni Sari

STIE Kesuma Negara Blitar

Abstrak: Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menilai seberapa jauh konsep akuntansi sektor publik berperan dalam perencanaan anggaran keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung. Dimana peran akuntansi sektor publik yang paling utama adalah sebagai alat perencanaan. Sedangkan akuntansi keuangan menggambarkan tentang kondisi keuangan dari suatu organisasi yang mencakup pada pendapatan dan pengeluaran suatu daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adalah anggaran perencanaan keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung adalah efektif, karena penerimaan daerah meningkat secara berkesinambungan sejalan dengan pertumbuhan perekonomian daerah.

Kata kunci: Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Pemerintah

PENDAHULUAN

Akuntansi Sektor publik berkembang semakin pesat, hal ini disebabkan karena adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Munculnya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU NO.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya Undang-Undang ini mengalami revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Melalui Undang-undang ini pemerintah menerapkan sistem desentralisasi sebagai pengganti sentralisasi otoritas yang dianggap tidak lagi relevan dalam menciptakan stabilitas nasional. Konsekuensi dari berubahnya paradigma tersebut adanya perubahan penyelenggaraan pemerintah di berbagai aspek terutama dalam aspek keuangan. Dengan adanya perubahan peraturan ini diharapkan keuangan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, dengan harapan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Keberhasilan otonomi daerah salah satu indikatornya adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan,

pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah.

Secara Undang-undang diharapkan Pemerintah Daerah mampu berkembang lebih mampu mandiri, sehingga sebagian dari kewenangan pemerintah pusat telah didelegasikan kepada daerah. Sebagian yang sudah didelegasikan di bidang keuangan adalah telah diatur antara pajak daerah dan pajak pusat, di samping juga dana perimbangan, pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada daerah dengan rambu-rambu aturan dari pemerintah pusat. Selain bidang keuangan banyak juga bidang lainnya utamanya bidang pemerintahan yang didelegasikan kepada daerah, yang lebih dikenal dengan pemerintahan daerah, menyangkut keseluruhan aspek pembangunan.

Dalam akuntansi sektor publik anggaran memiliki beberapa fungsi, namun fungsi anggaran yang paling utama adalah sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Sebagai alat perencanaan anggaran memberikan target yang harus dicapai pemerintah dalam satu periode. Sedangkan sebagai alat pengendalian memberikan batasan-batasan tertentu dalam melakukan belanja daerah. Anggaran juga dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah membawa tiga misi utama yaitu: menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah,

meningkatkan kualitas pelayanan umum kesejahteraan masyarakat, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Dalam aspek perencanaan, daerah sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, bervariasi strategik dan mampu berfikir strategik, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah. Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik (*public money*) telah dilakukan sebagaimana mestinya (*sesuai konsep value for money*), perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah. Sesuai amanat Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008, dan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, menyebutkan bahwa keberhasilan suatu daerah dapat diukur dari terealisasi anggaran keuangan daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang diangkat berdasarkan hal tersebut adalah "Sejauh mana Peran Akuntansi Sektor Publik dalam Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung".

Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan akuntansi sektor publik dalam perencanaan anggaran kinerja keuangan daerah kota Tulungagung.

KAJIAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (Haryanto *et. al* 2006). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi yang digunakan pada sektor swasta maupun sektor publik mempunyai tujuan yang berbeda. Dari prespektif ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai

suatu entitas yaitu aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan prespektif ilmu ekonomi tersebut. Tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002). Akuntansi sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensinya dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan Akuntansi Sektor Publik merupakan sebuah entitas yang segala aktivitasnya berhubungan dengan domain publik untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik. Dalam hal ini akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta berbeda namun fungsi sektor publik sebenarnya juga dapat dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya.

Peran Akuntansi Sektor Publik

Peran akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk: (1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi; (2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber data yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik (*American Accounting*

Association 1970 dalam Glynn 1993). Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu Penyediaan informasi, Pengendalian Manajemen, dan Akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan (*cost of services*) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (*charging for services*). Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses penganggaran. Pada sektor publik, penganggaran merupakan tahap yang membutuhkan keahlian khusus karena penganggaran pada sektor publik merupakan proses politik, sehingga manajer publik dituntut untuk memiliki *Political skill* disamping pemahaman teknik akuntansi.

Pelaksanaan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan informasi akuntansi terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial. Informasi akuntansi memiliki peran utama dalam menentukan indikator kinerja sektor publik.

Proses pengendalian manajemen, akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor

publik berupa laporan surplus/defisit pada pemerintahan, laporan rugi/laba dan aliran kas pada BUMN/ BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana, dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik hendaknya dipahami bukan sekedar akuntabilitas finansial saja, akan tetapi juga akuntabilitas *value for money*, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas publik.

Perencanaan Anggaran

Dijelaskan oleh Abe, Alexander (2005) perencanaan adalah susunan (*rumusan*) sistematis mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan dengan pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi-potensi, faktor-faktor internal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan tertentu. Nawawi (2003) mengemukakan sebagai berikut "perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan". Pengertian ini menunjukkan bahwa perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu dari beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi/perusahaan. Selanjutnya memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut.

Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2002). Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Merujuk definisi-definisi di atas Perencanaan Anggaran merupakan bagaimana cara mengalokasikan dana yang baik dan penggunaannya sesuai

dengan tujuan yang telah diharapkan, sehingga mampu menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Keuangan Daerah

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No.17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut pada bagian penjelesan atas undang-undang tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

Sedangkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dari sisi subyek meliputi seluruh obyek yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai pertanggungjawaban, sedangkan dari sisi tujuan, meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penugasan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

APBD dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bertolak dari pengertian keuangan negara tersebut, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara dimana negara dapat dianalogikan dengan daerah. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah

semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah (Ichksan *et.al* 1997).

Batasan keuangan negara yang lebih luas Fatchurrochman (2002) menyebutkan, yaitu segala harta milik kekayaan negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena kekayaan itu yang dikelola oleh pejabat negara, lembaga pemerintahan umum, yang dikuasai atau diurus oleh bank pemerintah, yayasan pemerintah dengan status hukum publik atau perdata, perusahaan negara dan usaha dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus, seperti kontrak manajemen, perjanjian dengan penyertaan pemerintah atau penunjukan pemerintah. Dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan kewenangan dan kemampuan yang memadai dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.

UU No.33 Th. 2004 tentang sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pasal 5 ayat (1) terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari: a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), b) Dana perimbangan, c) lain-lain pendapatan, sedangkan pembiayaan bersumber dari: a) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah. b) Penerimaan pinjaman daerah, c) Dana cadangan daerah, d) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil analisis pendapatan dan pengeluaran merupakan komponen dalam menganalisis keuangan daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, akan terjadi surplus anggaran dan jika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan akan terjadi defisit anggaran. Dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana kondisi keuangan yang ada pada tahun

sekarang dan kecenderungan pada tahun-tahun mendatang, sehingga pola surplus dan defisit anggaran dapat diprediksikan. Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Dilihat dari sisi pengeluaran, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu membelanjakan pendapatan yang diterima untuk selanjutnya memberikan timbal balik atas pengeluaran tersebut. Timbal balik dalam hal ini seperti pendapatan pajak dan retribusi. Analisis sisi pendapatan menggunakan pendapatan asli daerah sebagai titik sentral analisisnya, sedangkan analisis sisi pengeluaran menekankan pada belanja daerah sebagai titik sentral analisisnya. Diharapkan perbaikan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berjalan lancar.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Moleong (2010:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata secara alamiah dan memanfaatkan metode alamiah. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis dan tidak memerlukan angka-angka, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Menurut Husaini dan Purnomo (2009:130) bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan penerapan konsep akuntansi sektor publik dalam perencanaan anggaran keuangan daerah di Pemerintah Daerah kabupaten Tulungagung Tahun 2015

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Dimana peneliti akan menggabungkan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu: wawancara tidak terstruktur, observasi terstruktur dan dokumentasi.

Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (dalam Usman, 2009:85). Mereka mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

PEMBAHASAN

Peran Akuntansi Sektor

Akuntansi sektor publik memiliki tiga peran, yang pertama Akuntansi sektor publik dapat memberikan informasi yang memungkinkan pada pelaksanaan tanggung jawab program yang dilakukan domain publik dalam mengelola Anggaran keuangan Daerah secara tepat dan efektif dalam menjalankan wewenangnya. Bagi pemerintah Tulungagung informasi

akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan startegik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Hal ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kedua, peran akuntansi sektor publik adalah sebagai alat perencanaan. Di sini pemerintahan Tulungagung dalam penerapan kinerja keuangan Daerah sesuai dengan perencanaannya sehingga anggaran yang diterapkan dapat terealisasi.

Ketiga, peran Akuntansi sebagai pengendalian di sini akuntansi digunakan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/defisit pada pemerintahan. Dengan harapan penerapan peran akuntansi yang ketiga ini pemerintah Tulungagung dapat melaksanakannya dengan baik sehingga surplus dan defisit anggaran dapat diperhatikan.

Tabel 1.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	213.010.206.029,75	237.521.112.557,50	111,51
	Pajak Daerah	53.873.000.000	56.300.000.000	104,51
	Retribusi Daerah	18.490.423.265	18.445.338.055	99,76
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah	2.915.868.764,75	4.078.028.759,50	139,86
	Lain-lain PAD yang sah	137.730.914.000	158.697.745.743	115,22
2	Dana Perimbangan	1.286.442.394.282,20	1.300.513.576.272	101,09
	Dana Bagi hasil	84.402.137.282,2	78.695.899.272	93,24
	Dana Alokasi Umum	1.111.457.117.000	1.111.457.117.000	100
	Dana Alokasi Khusus	90.583.140.000	110.360.560.000	121,83
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	703.717.485.420	770.127.869.405,32	109,44
	Bagi hasil pajak dari Prov dan Pemda Lainnya	107.163.422.420	136.452.938.405,32	127,33
	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	427.757.809.909	458.904.678.000	107,28
	Bantuan keuangan dari Prov atau Pemda lainnya	168.806.253.000	174.680.253.000	103,48

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015

Perencanaan Anggaran Kinerja Keuangan Daerah Kota Tulungagung (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2015)

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah melebihi target yang ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 dianggarkan sebesar 213.010.206.029,75 dan terealisasi sebesar 237.521.112.557,50 atau 111,51%. Sedangkan Dana Perimbangan Sebesar 1.286.442.394.282,20 dan terealisasi sebesar 1.300.513.576.272 atau 101,09% yang meliputi bagi hasil

pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk pendapatan lain-lain anggarannya sebesar 703.717.485.420 dan terealisasi 770.127.869.405,32 atau 109,44%. Yang meliputi dana bagi hasil pajak dan provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.. Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Tulungagung dalam melaksanakan perencanaannya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, sehingga mengalami surplus keuangan. Keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan

daerah secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan serta pertumbuhan perekonomian yang ada di daerah tanpa mengurangi alokasi terhadap faktor-faktor produksi yang telah ada dan mengedepankan prinsip keadilan.

KESIMPULAN

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui peran utama akuntansi sektor publik yang mana peran utamanya adalah sebagai penyedia informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.

Perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu dari beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan, sedangkan penganggaran merupakan berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Keuangan daerah meliputi pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan pada kinerja keuangan daerah kota Tulungagung mengalami surplus keuangan sebab dimana pendapatan daerah Tulungagung pada tahun 2015 sudah terealisasi yaitu Pendapatan Asli Daerah melebihi target yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander.** 2005. *Perencanaan Daerah Partisipasi*. London: Pondok Edukasi.
- Fatchurrochman.** 2002. *Manajemen Keuangan Publik*. Materi Pelatihan Anti Korupsi, *Indonesia Coroption Watch*.
- Glynn, J.J.** 1993. *Public Sector Financial Control and Accounting*. 2nd Ed. Oxford: Blackwell.
- Halim.** 2004. *Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, dan Korupsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Haryanto, Arriffudin, dkk.** 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Diponegoro university press.
- Mardiasmo.** 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy.** 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady.** 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- UU No. 22 Tahun 1999** Tentang Pemerintah Daerah.
- UU No. 25 Tahun 1999** Tentang Perimbangan Keuanga Antara Pusat dan Daerah.
- UU No. 17 Tahun 2004** Pasal 1 Tentang Keuangan Negara.
- UU No. 3 Tahun 2004** pasal 5 Tentang Sumber-sumber Penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi.
- UU No. 32 Tahun 2004** Tentang Pendapatan Asli Daerah.